



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang akan disusun tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

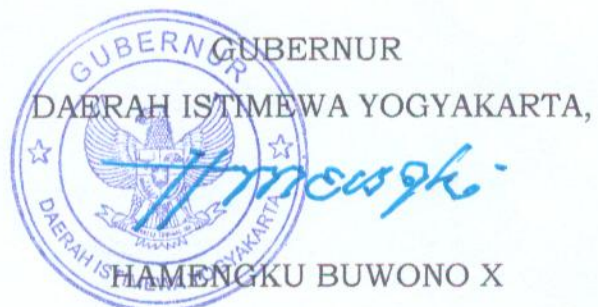
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 318 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM  
 PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2025

SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
Biro Organisasi	1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan.	III
	2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Paniradya, Inspektorat, dan Badan.	III
	3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas.	III
	4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT.	III
	5. Lembaga Non Struktural.	II
	6. Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.	III
	7. Pakaian Dinas.	III
	8. Kelas Jabatan (JPT, JA, JP, JF, dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemda DIY.	II
	9. Standar Kompetensi Jabatan (Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Sosio Kultural, dan Standar Kompetensi Teknis).	II
	10. Budaya Pemerintahan.	III
	11. Kerjasama Penyediaan Jasa.	III
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Rencana Aksi Ekonomi Hijau.	I
	2. Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 (tiga) Kilogram.	III
Biro Kesejahteraan Rakyat	1. RAD Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari.	IV
	2. RAD Penanggulangan HIV AIDS di DIY.	IV



SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
	3. RAD Eliminasi TBC DIY 2025-2029.	IV
	4. RAD Eliminasi Malaria DIY.	IV
	5. Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.	IV
	6. Perubahan atas Pergub Nomor 76 Tahun 2025 tentang Penetapan Petugas Haji DIY Tahun 2025.	III
	7. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan.	IV
	8. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas.	IV
Biro Bina Mental Spiritual	1. Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	III
	2. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional.	II
Biro Hukum	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penataan Produk Hukum Daerah.	III
	2. Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan	IV
Biro Umum dan Protokol	Perkantoran Ramah Lingkungan	IV
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Tuwanggana	I
	2. Nayantaka	III
	3. Pedoman Pemerintahan Kalurahan	III
	4. Fasilitasi Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan	IV
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	1. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.	II
	2. Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.	I
	3. Cetak Biru Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.	IV
	4. Tata Cara Perizinan, Zonasi, dan Sewa Bagian-Bagian Jalan Provinsi.	I
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	1. Komite Sekolah Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.	I
	2. Peta Jalan Revitalisasi SMK.	II
	3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.	II



SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
	4. Pedoman Pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.	III
	5. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.	II
Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemda DIY.	II
	2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik.	I
	3. Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Induk <i>Jogja Smart Province</i> 2024 – 2028.	III
Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah.	I
	2. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah.	I
	3. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah.	I
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Kecil	I
	2. Koperasi Merah Putih	II
Rumah Sakit Khusus Paru Respira	Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal RS Khusus Respira.	II
Dinas Sosial	1. Forum Komunikasi Lembaga Kelanjutusiaan.	I
	2. Pembentukan Gugus Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan.	I
	3. Perlindungan Anak Dalam Kondisi Khusus.	I
	4. Pola Koordinasi Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di DIY	III
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1. Pedoman Penyuaunan Peraturan Kalurahan.	II
	2. Pemanfaatan Ruang Resapan Air.	IV
	3. Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai.	I
	4. SRS Sumbu Filosofi Karaton Pakualaman dan Kotabaru.	II
	5. SRS Pansela Gunungkidul, Pantai Samas, Pantai Parangtritis dan Pansela Kulon Progo.	II
	6. SRS Karst Gunungaewu dan Sokoliman.	III
	7. SRS Gunung Merapi.	III
	8. SRS Candi Prambanan - Candi Ijo.	IV
	9. SRS Perbukitan Menoreh.	I



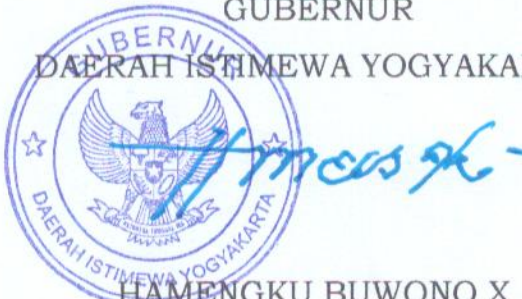
SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
Dinas Perhubungan	1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Reklame Di Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum Dan Bus Trans Jogja.	II
	2. Pencabutan Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Tempat Pemberhentian Kendaraan Umum dan Bus Trans Jogja.	II
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Perubahan Peraturan Gubernur No 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	II
	2. Tata Cara Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.	III
	3. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	IV
Dinas Pertanian dan Pangan	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	IV
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)	1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.	III
	2. Kalurahan/Kelurahan Budaya.	III
	3. Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Analisis Dampak pada Warisan Budaya.	IV
Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan DIY	IV
	2. Pelaksanaan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	IV
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Fasilitasi Pengelolaan Perpustakaan Kasultanan dan Kadipaten.	I
	2. Penyusutan Arsip.	II
	3. Jadwal Retensi Arsip.	III
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah.	I
	2. Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.	III
	3. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	II
	4. Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah.	III
	5. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pendidikan.	
	6. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.	IV IV



SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
	7. Penugaaan Pengelolaan Cadangan Pangan Kepada PT Taru Martani DIY.	III
	8. Tarif Air Beraih Pada Perumda Air Beraih Tirtatama DIY.	IV
	9. Pengelolaan BUMD.	I
	10. Perubahan Tarif Retribusi Daerah.	III
	11. Perubahan Rincian LLPAD yang Sah.	III
	12. Perubahan Tarif Retribuai Daerah.	II
	13. Perubahan Rincian LLPAD yang Sah.	II
	14. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat.	II
	15. Pajak Air Permukaan.	IV
	16. Analisis Standar Belanja Non Fisik.	III
	17. Pengelolaan Rumah Daerah.	II
	18. Nilai Perolehan Air Permukaan.	II
	19. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus.	II
	20. Pedoman Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah.	II
	21. Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada BUMD.	I
	22. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Daerah	I
	23. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah.	I
	24. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah.	III
	25. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah.	III
	26. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.	
Bandiklat	Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang <i>Corporate University</i> Pemerintah Daerah.	IV
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan.	III
	2. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Berkelanjutan di Lingkungan Pemerintah DIY.	IV
BKD	1. Tata Kelola Administrasi Kepegawaian.	II



SKPD PENGUSUL	JUDUL RAPERGUB	TRIWULAN
	2. Pemberian Delegasi dan Mandat Bidang Kepegawaian.	IV
	3. Tata Cara Pemberian Cuti ASN.	III
	4. Pedoman Pelaksanaan Tubel PNS.	II
	5. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.	III
	6. Pemberian Delegasi dan Mandat Bidang Kepegawaian	III
Bapperida	1. RKPD Tahun 2026.	II
	2. Perubahan RKPD Tahun 2025.	II
	3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.	III
	4. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.	III
	5. Perubahan Rencana Strategis 2022 – 2027.	III
	6. Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2027.	II
	7. Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	III
	8. Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.	III
BPBD	1. Pedoman Kalurahan Tangguh Bencana.	III
	2. Pedoman Dunia Usaha Siaga Bencana.	III
	3. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas dan Koordinasi Dalam Penanganan Serta Pencegahan Kebakaran di DIY.	IV
Inspektorat	<i>Fraud Control Plan</i>	II

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X